BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan mengacu pada Renstra Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-14, Revitalisasi Perikanan dan Kelautan, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.

Salah satu indikstor makro ekonomi pada pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan adalah pertumbuhan produksi perikanan. Indikator ini diarahkan untuk mendukung kebijakan Industrialisasi Perikanan dalam rangka merespon kebijakan pembangunan nasional yaitu Pro-Poor (pengentasan kemiskinan), Pro-Growth (pertumbuhan), Pro-Job (penyerapan tenaga kerja) dan Pro-Environment (pemulihan dan pelestarian lingkungan). Selama kurun waktu 2013-2015 data pertumbuhan produksi perikanan Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan positif terutama pada Usaha Perikanan Budidaya, namun sejalan pencapaian pertumbuhan produksi di beberapa daerah masih terdapat beberapa permasalahan baik secara teknis, sosial dan lingkungan.

Dalam rangka merespon tuntutan masyarakat menuju *good governance*, pemerintah telah bertekad untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan amanah yang dibebankan kepada masing-masing instansi pemerintah kepada pihak yang memberikan amanah melalui suatu laporan akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban secara periodik.

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (*good governance)* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan dan sebagai tindak lanjut maka telah diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan laporan yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2015 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sul-Sel tahun 2015 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban yang mengacu pada Perpres RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. *MAKSUD DAN TUJUAN*

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel tahun 2015 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan.

C. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dasar sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003, maka organisasi perangkat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3 Sub Bagian
3. Kepala Bidang (empat) dengan membawahi masing-masing 3 Seksi
4. Kepala UPTD

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (Sesuai PerGub No. 40 Tahun 2008 Tanggal 16 - 12 - 2008

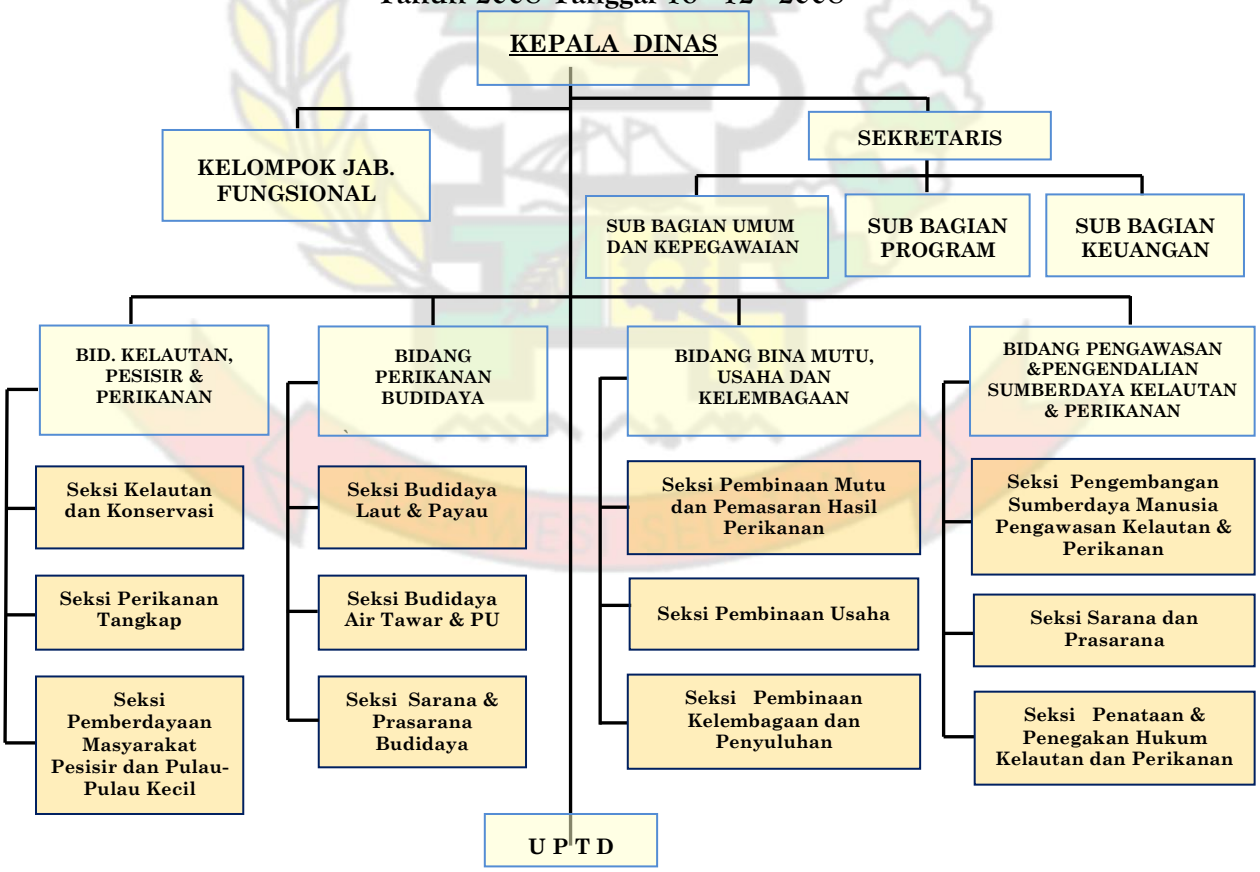

b. Tugas Pokok

- **Kepala Dinas**

  Melaksananakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota di bidang kelautan dan perikanan peraturan perundangan yang berlaku.

- **Sekretaris**

  Melaksanakan penyusunan program, urusan keuangan, kepegawaian, urusan umum serta pengendalian dan pengawasan.

- **Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**
  - Melakukan urusan ketatausahaan dinas meliputi surat menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dan urusan rumah tangga dinas.
  - Mengelola administrasi kepegawaian meliputi rencana formasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pengembangan karir dan kesejahteraan pegawai.

- **Sub. Bagian Program**
  - Melakukan analisis, evaluasi dan penyiapan bahan, perumusan rencana program dan kegiatan.

- **Sub. Bagian Keuangan**
  - Mengolah administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

- **Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap**
  - Melakukan pembinaan di bidang kelautan, pesisir dan perikanan tangkap

- **Bidang Perikanan Budidaya**

  Melaksanakan pembinaan teknologi Budidaya Perikanan

  Rincian Tugas :

  - Melakukan fasilitasi transformasi teknologi budidaya laut, payau, air tawar dan perairan umum
  - Melaksanakan pengembangan dan pengendalian budidaya perikanan
  - Melakukan pembinaan dan pengaturan sarana dan prasarana budidaya
  - Melakukan analisis data statistik dan informasi budidaya perikanan
  - Melakukan koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan budidaya
  - Merencanakan pembangunan perikanan budidaya
  - Melakukan pembinaan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan budidaya

- **Bidang Bina Mutu, Usaha dan Kelembagaan**

  Melakukan pembinaan mutu, usaha dan kelembagaan di bidang kelautan dan perikanan

  Rincian Tugas :

  - Memfasilitasi pembinaan kelembagaan dan permodalan serta kerjasama usaha swasta di bidang perikanan
  - Melakukan pelayanan, perizinan, pemantauan, pengawasan, pembinaan pemasaran dan promosi
  - Memfasilitasi pembinaan teknolgi penanganan dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan
  - Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi, lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan
  - Menetapkan kebijakan dan melaksanakan pungutan perikanan
  - Melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan di bidang perikanan

- Melaksanakan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil perikanan
- Melaksanakan kebijakan pengendalian hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP

▪ **Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Rincian Tugas :

- Melaksanakan sosialisasi dan monitoring terpadu serta pengawasan dan pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan
- Melakukan pembinaan dan pengembangan SDM pengawas kelautan dan perikanan
- Melaksanakan pembinaan, penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan
- Meningkatkan kapasitas PPNS dan sarana pengawasan
- Pengembangan kapsitas kelembagaan masyarakat dalam pengawasan (SISWASMAS)

c. Fungsi

▪ **Kepala Dinas**

- Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah
- Pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan
- Koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di bidang kelautan dan perikanan
- Pemberian izin usaha, pembinaan mutu dan pemasaran sesuai tugas pokoknya

- Koordinasi penyelenggaraan pendidikan aparatur dan penyuluhan
- Kajian pengembangan teknologi dan informasi serta promosi dan pengembangan investasi
- Penyelenggaraan dan koordinasi usaha konservasi, rehabilitasi, pengawas-an dan pengendalian serta penegakan aturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
- Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas
- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

▪ **Sekretaris**

- Penyiapan penyusunan bahan rencana anggaran belanja dan pendapatan dinas yang meliputi pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan
- Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas, penyiapan penyusunan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi, kenaikan pangkat dan pengelolaan administrasi kepegawaian
- Perumusan rencana, evaluasi, pemantauan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana
- Pengelolaan administrasi surat menyurat, sistem kearsipan, rumah tangga perlengkapan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

▪ **Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas
- Merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan dinas
- Melaksanakan dan mengatur administrasi, barang inventaris, pendistri-busian, pemanfaatan dan pengusulan penghapusan barang
- Menyelenggarakan urusan kehumasan dan perpustakan dinas
- Menyusun laporan barang investasi dinas

- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian
- Menyusun rencana formasi jabatan dan data pegawai
- Melaksanakan usul mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, pemberhentian, izin belajar, karpeg, kartu askes dan pembinaan karir pegawai
- Melaksanakan urusan kenaikan gaji berkala dan cuti
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan
- Mengurus dan membina peningkatan kesejahteraan, disiplin, absensi dan mengusulkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta mengusulkan pemberian sanksi kepada pegawai yang indisipliner
- Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)
- Mengevaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan LP2P

▪ **Sub Bagian Program**

- Melaksanakan evaluasi dan penyiapan bahan perumusan rencana program dan kegiatan
- Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dinas
- Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dinas dengan unit-unit kerja terkait
- Menyusun laporan tahunan dan data statistik kelautan dan perikanan
- Mengkoordinasikan rencana induk pengembangan perikanan
- Membuat konsep naskah dinas, keputusan dan ketatalaksanaan dinas
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya

▪ **Sub. Bagian Keuangan**

- Menginventaris sumber-sumber penerimaan dinas
- Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang potensial
- Melaksanakan pencatatan terhadap pemungutan dan pelaporan Pendapat Asli Daerah (PAD)

- Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan pembinaan administrasi bendaharawan lingkup dinas
- Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan lingkup dinas
- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dinas
- Mengklarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya

▪ **Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap**

- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian ikan di laut dan perairan umum termasuk pengembangan teknologi penangkapan spesifik daerah serta pengujian dan penerapan teknologi di bidang penangkapan ikan dan kapal perikanan
- Pelaksanaan identifikasi dan koordinasi kawasan konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan ikan
- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengembangan sumberdaya non hayati, analisa perhitungan dan pemetaan jasa kelautan

▪ **Bidang Perikanan Budidaya**

- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, standarisasi dan memfasilitasi transformasi teknologi budidaya laut, payau, air tawar dan perairan umum
- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan air tawar, laut, payau dan perairan umum
- Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan sarana dan prasarana budidaya
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

▪ **Bidang Bina Mutu, Usaha dan Kelembagaan**

- Fasilitasi pembinaan mutu, pemasaran hasil perikanan, kelembagaan, permodalan, bimbingan pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan
- Pelayanan perizinan, pemantauan dan pengawasan, pembinaan pemasaran dan promosi

- Fasilitasi pembinaan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

▪ **Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis sumberdaya ikan dan kelautan
- Pembinaan dan pengembangan SDM pengawasan kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesehatan ikan
- Penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan dan kelautan
- Pembinaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan

D. *LINGKUNGAN STRATEGIS*

a. Jumlah Pegawai

Dalam penunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu faktor yang penting adalah faktor Sumberdaya Manusia Aparatur. Adapun jumlah PNS yang dipekerjakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sul-Sel tahun 2015 sampai dengan akhir bulan Desember 2015 adalah sebanyak 206 dengan rincin sebagai berikut:

Tabel 1. Sebaran PNS Dinas Kelautan dan Perikanan
Prov. Sul-Sel TA. 2015 Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Gol. Ruang	A		B		C		D		Jumlah		Total
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
1	I	2	0	0	1	1	0	0	0	3	1	4
2	II	5	0	4		7	6	6	0	22	6	28
3	III	5	9	26	35	26	17	12	14	69	75	144
4	IV	13	6	9	1	0	0	1	0	23	7	30
Jumlah		25	15	39	37	34	23	19	14	117	89	206

Sebaran PNSD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menurut pendidikan dan jenis kelamin

Tabel 2. Sebaran PNSD Dinas Kelautan dan Perikanan
Prov. Sul-Sel TA. 2015 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah
		P	W	
1	S3	1	0	1
2	S2	23	13	36
3	S1	66	65	131
4	Sarjana muda	6	4	10
5	SLTA	17	6	23
6	SLTP	2	1	3
7	SD`	2	0	2
Jumlah		117	89	206

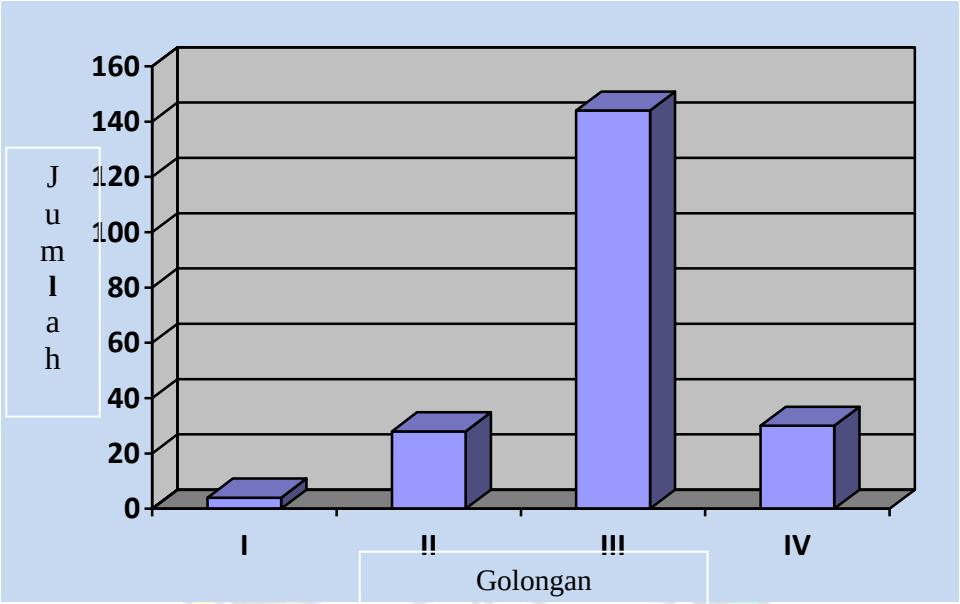

Grafik 1. Sebaran PNS Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Golongan

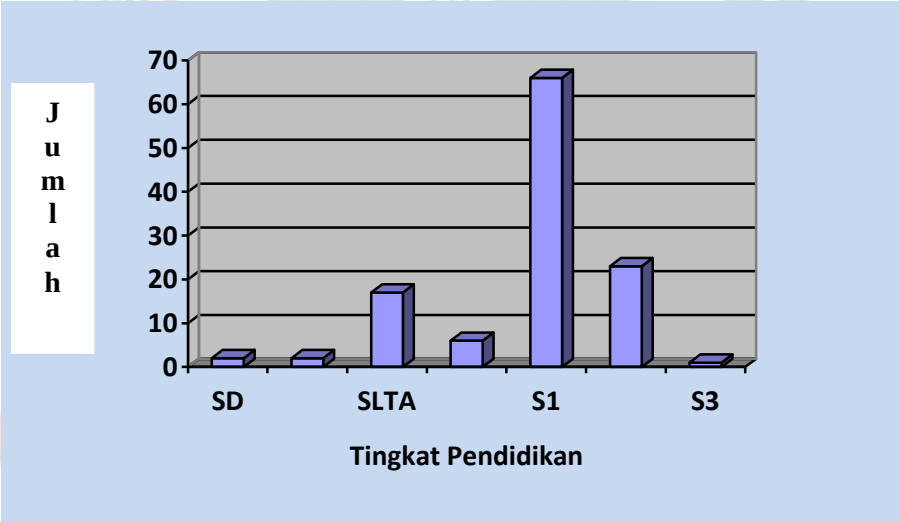

Grafik 2. Sebaran PNS Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Tingkat Pendidikan

b. Isu Strategis

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis ekstrenal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan : Jaringan saluran irigasi, jalan tani tambak, air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, pelabuhan perikanan.
- Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan
- Kualitas armada kapal penangkap ikan masih rendah
- Terbatasnya akses permodalan untuk usaha perikanan
- Inovasi teknologi pada usaha perikanan